

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi, mengakibatkan meningkatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban pengelolaan di pemerintahan pusat ataupun daerah. Lingkup sektor publik menjadi sorotan karena banyaknya pandangan negatif oleh beberapa pihak akan dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan adanya tuntutan akuntabilitas dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Akuntabilitas publik merupakan upaya pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal yang dievaluasi secara periodik (Mardiasmo, 2009).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah informasi yang disediakan pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan kepada publik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah untuk periode tertentu (Faturey Et al., 2021). PP No.8 tahun 2006 menjelaskan jika “laporan keuangan merupakan upaya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah sepanjang satu periode”. Oleh karena itu, instansi pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun laporan yang mempunyai kualitas dan akuntabel sejalan dengan standar yang telah diberlakukan untuk dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Sebuah Laporan keuangan dapat dikategorikan mempunyai kualitas apabila dalam penyajiannya

memuat informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. PP No.71 Tahun 2010 Tentang SAP, menyebutkan ada 4 kriteria kualitatif yang menjadi ketentuan normatif laporan keuangan pemerintahan agar bisa dikategorikan berkualitas. Keempat karakteristik tersebut terdiri dari: relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat untuk dipahami.

Opini yang dikemukakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merupakan cerminan untuk melihat kualitas sebuah laporan keuangan. Opini yang diberikan merupakan pernyataan terkait pemeriksaan atas laporan keuangan untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang tersaji di dalamnya (bpk.go.id). Dalam melakukan penilaian LKPD, ada 4 jenis opini/ pernyataan yang berikan oleh BPK diantaranya: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Tidak Memberi Pendapat (TMP) (UU No.15 Tahun 2004).

Dari hasil temuan yang dilakukan oleh BPK dalam lima tahun terakhir ini (2016-2020) opini pada pelaporan keuangan pemerintah daerah seluruh Indonesia mengalami peningkatan. Pernyataan ini dibuktikan dengan kenaikan opini WTP dari persentase 70% pada tahun 2016, naik ke 76% di tahun 2017, meningkat 82% di tahun 2018 dan kenaikan masing-masing 90% ditahun 2019 dan 2020 (bpk.go.id). Berdasarkan hasil temuan tersebut berarti dalam menyajikan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan daerah telah disusun dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Namun sejalan dengan pelaksanaannya, masih banyaknya penemuan oleh badan pengawas Keuangan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pengalokasian anggaran sehingga akuntabilitas publik tersebut tidak terlaksana. BPK masih menemukan banyaknya kelemahan pada sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan mengungkap adanya 5.367 permasalahan yang terdiri atas 1.699 (32%) permasalahan tentang kelemahan dalam pengendalian penyajian maupun pelaporan, 2.498 (46%) dimana permasalahan menyangkut kesenjangan sistem pengendalian terhadap pengalokasian APBD, serta 1.170 (22%) permasalahan tentang struktur pengendalian intern dalam penyajian LKPD tahun 2020. Selain itu BPK juga mengungkap 6.295 permasalahan terkait penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian negara, potensi kerugian serta kekurangan penerimaan. (IHPS I tahun 2021).

Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK pada LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2018-2020, BPK memberikan opini yang ditunjukkan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan BPK

Tahun Anggaran	Opini BPK
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber: www.bpk.go.id

Berdasarkan hasil temuan BPK terkait pemeriksaan LKPD, pemerintahan kabupaten Humbang Hasundutan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

secara berurut. Ini menandakan pada saat pelaporan sudah tersaji dan dapat dikatakan sudah berkualitas. Namun kenyataannya dalam penyajian laporan keuangan, BPK masih banyak menemukan penyimpangan dan lemahnya penerapan sistem pengendalian dan ketidakpatuhan. Pada tahun Anggaran 2018 BPK mengungkapkan terdapatnya penyimpangan sistem pengendalian dalam menyusun laporan keuangan diantaranya: 1) Realisasi belanja modal melampaui anggaran sebesar Rp 802. 958.978,00 2) pemanfaatan dan penatausahaan aset tetap masih belum sepenuhnya tertib dan kurang memadai, 3) pengelolaan tambahan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran sekretariat daerah tidak tertib (BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).

BPK mengungkap adanya kelemahan sistem pengendalian intern pada periode pelaporan tahun 2019, adapun kelemahan tersebut yaitu 1) ditemukannya kesalahan klasifikasi penganggaran belanja pada dua unit organisasi perangkat daerah, 2) penetapan perubahan APBD TA 2019 terlambat dan realisasi pembelanjaan modal atau peralatan maupun aset lainnya yang melampaui anggaran, 3) belum memadainya penatausahaan aset tetap (BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).

Pada Laporan Keuangan TA 2020 BPK juga mengungkap beberapa penyimpangan pada sistem pengendalian intern serta ketidaktaatan pada peraturan perundang-undangan diantaranya adalah 1) Penatausahaan aset tetap kendaraan belum sepenuhnya memadai, adanya perubahan APBD tahun 2020 tidak disepakati oleh DPRD, 3) adanya kekurangan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebanyak Rp 111.780.000,00, 4) terdapat kelebihan pembayaran

bahan bakar minyak sebesar Rp 51.836.250,00 (BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).

Dalam proses penyusunan LKPD, ada banyak faktor pendukung dalam proses penyusunannya, sumber daya manusia (SDM) adalah sebuah unsur penting serta penentu keberhasilan penyajian laporan keuangan. Baik buruknya Laporan Keuangan disebabkan oleh kompetensi dari manusianya (Subrata dalam Trisnawati & Wiratmaja, 2018). Pemahaman serta keahlian dalam menyajikan sebuah laporan keuangan akan berdampak pada kualitas akhir yang dihasilkan.

Laitera at el., (2021) mengatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD, semakin berkompeten sumber daya manusianya maka laporan yang akan dihasilkan akan semakin baik. Upaya dalam peningkatan kompetensi manusia dapat dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan. Sejalan dengan Ramadhani at el., (2019) mengemukakan pengaruh positif kualitas LKPD berasal dari Kompetensi sumber daya manusia. Namun, ini dibantah oleh Pangestu at el., (2019) memperlihatkan tidak ditemukannya kualitas sumber daya manusia memengaruhi kualitas LKPD.

Selain itu, sistem informasi akuntansi (SIA) berperan penting pada proses penyusunan laporan keuangan. Semua organisasi memerlukan informasi dalam pengambilan keputusan yang tepat, dasar pembuatan keputusan yang tepat diperlukan sebuah sistem untuk mengumpulkan dan mengelolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang utuh. Pemerintah Daerah telah ditugaskan untuk

menyajikan laporan pertanggungjawaban dimana untuk mempermudah proses penyajiannya dibutuhkan sistem informasi akuntansi (Pura, 2021). Dengan adanya SIA dapat mempermudah para pembuat laporan keuangan untuk menyusun informasi keuangan dan beroperasi sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Sistem informasi akuntansi diharapkan dapat memberikan informasi keuangan untuk melakukan pengembangan program yang direncanakan dan pengevaluasian kinerja (Bastian, 2007).

Rohmah et al., (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif SIA dalam mempengaruhi kualitas LKPD. Hal ini berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu mengaplikasikan sistem informasi akuntansi secara tepat, keamanan sistem, akan mendapat hasil yang berkualitas. Namun berbeda dengan Pura (2021) yang menyimpulkan bahwa SIA mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan mempengaruhi kualitas LKPD, berarti bahwa sistem informasi akuntansi tidak memberikan pengaruh apabila dalam menjalankan sistem tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana.

Faktor selanjutnya adalah sistem pengendalian internal (SPI) dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dilaksanakan oleh pihak BPK setiap tahunnya masih mengungkap adanya kelemahan SPI di instansi pemerintahan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab timbul karena adanya celah atas lemahnya penerapan sistem pengendalian dalam lembaga. Pengaplikasian yang baik terhadap sistem pengendalian internal dalam

instansi pemerintahan mempunyai dampak dalam hasil akhir laporan keuangan (Ramadhani et al., 2019). Sejalan dengan Trisnawati & Wiratmaja (2018), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa SPI berdampak positif pada kualitas LKPD, semakin baik pengaplikasian SPI maka kualitas laporan akan semakin baik. Namun berbanding terbalik dengan Hasanah & Siregar (2021) yang menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh SPI pada kualitas LKPD. Kondisi ini disebabkan kurangnya pengawasan yang diterapkan oleh pemimpin dalam rangka penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan *research gap* yang dikemukakan diatas, penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti sangatlah penting. Jenis penelitian ini sudah ramai dikaji oleh peneliti terdahulu, namun hanya saja hasil penelitian terdahulu belum konsisten hasilnya. Karena perbedaan hasil tersebut peneliti hendak melakukan penelitian untuk pengujian dengan menggunakan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Penelitian ini adalah replika dari Trisnawati & wiratmaja (2018) yang meneliti Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah menambahkan variabel independen yaitu variabel kualitas sistem informasi akuntansi karena dianggap penting, alasan penambahan variabel ini adalah sesuai dengan PP RI No.8 Tahun 2006 Tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pasal 6 ayat 2 menyatakan jika sistem akuntansi yang diterapkan oleh instansi pemerintahan berkaitan erat dengan tingkat

keandalan laporan keuangan. Sistem akuntansi harus diterapkan dan sesuai pada SAP dengan melihat situasi pendukung yang dibutuhkan. selain itu Pura (2021) juga berpendapat bahwa keberadaan sistem informasi akuntansi akan mempermudah pemerintahan daerah untuk menyajikan laporan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul **”Pengaruh Kompetensi SDM, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka identifikasi permasalahan untuk penelitian ini adalah:

1. Banyaknya tuntutan akuntabilitas atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah.
2. Banyaknya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pengalokasian anggaran sehingga akuntabilitas tidak terlaksana.
3. Lemahnya penerapan sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintahan menjadi celah terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan.

4. Sistem informasi akuntansi dapat berpengaruh pada penyajian laporan keuangan apabila dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan diaplikasikan dengan baik di lingkup instansi pemerintahan daerah.
5. Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah, BPK masih menemukan banyak penyimpangan pada sistem pengendalian intern dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan yang telah disebutkan, agar pembahasan topik penelitian lebih terarah, batasan masalah yang akan dibahas oleh peneliti hanya meliputi pengaruh kompetensi SDM, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, adapun rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan?
3. Apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan?

4. Apakah kompetensi SDM, kualitas sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi SDM, kualitas sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Bermanfaat dalam memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai faktor/hal yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini hendaknya dapat digunakan menjadi sarana pengembangan ilmu dan kajian di bidang Akuntansi, terkhusus dalam Akuntansi Sektor Publik.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, di tahun-tahun mendatang dapat memberikan masukan dan fokus yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas laporan keuangan.

